

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM TATA NEGARA DAN *FIQH SIYASAH*
(Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Tyo Fahmy Firmansyah

NIM. 05040422095



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2026**

Pernyataan Keaslian Naskah

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Tyo Fahmy Firmansyah
NIM : 05040422095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN
FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan
Plumpang Kabupaten Tuban)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Mei 2026

Yang menyatakan,



M. Tyo Fahmy Firmansyah
NIM. 05040422095

Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Tyo Fahmy Firmansyah

NIM : 05040422095

Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN *FIQH SIYASAH*
(Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten
Tuban)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 05 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si

NIP. 197911052007011019

Pengesahan

PENGESAHAN

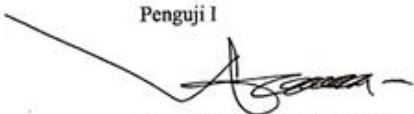
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Tyo Fahmy Firmansyah
 NIM. : 05040422095
 Judul : Implementasi Program *Smart Village* dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban)

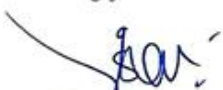
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si
 NIP. 197911052007011019

Penguji III


Ibnu Mardivanto, M.H
 NIP. 198703152020121009

Penguji II


H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H
 NIP. 198905172015031006

Penguji IV


Elly Uzlifatul Jannah, M.H
 NIP. 199110032019032018

Surabaya, 12 Juli 2026
 Mengesahkan,
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Dr. H. Sunawan, M.Ag.
 NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Tyo Fahmy Firmansyah
NIM : 05040422095
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : tyofahmy040204@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

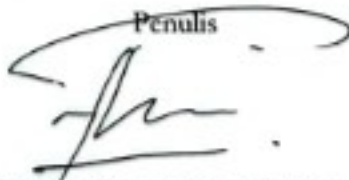
Implementasi program Smart Village dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah: studi kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 September 2026

Penulis

(M. Tyo Fahmy Firmansyah)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program *Smart Village* di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam perspektif Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyasah Idariyah*. Program *Smart Village* merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa serta pentingnya kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori *Good Government*, teori kewenangan dalam Hukum Tata Negara, dan *Fiqh Siyasah Idariyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program *Smart Village* di Desa Plumpang telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan administrasi desa. Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pelayanan, mempermudah pengelolaan data masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dari perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan Program *Smart Village* telah sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan aspek kepastian hukum melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelayanan berbasis digital. Sementara itu, dalam perspektif *Fiqh Siyasah Idariyah*, implementasi Program *Smart Village* telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa keterbatasan literasi digital masyarakat dan kondisi infrastruktur jaringan internet yang perlu ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program.

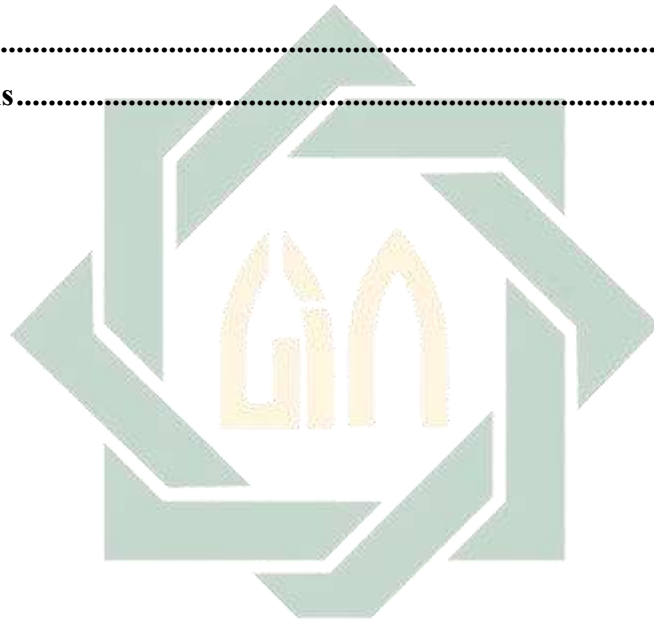
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Desa Plumpang disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan *Smart Village*, meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital, serta memperkuat sarana dan prasarana teknologi informasi guna mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Naskah	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Abstrak.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional	20
I. Metode Penelitian	23
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KONSEPTUAL	28
A. Dasar Hukum Program Smart Village	28
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	28
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	28
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	29
4. Relevansi Dasar Hukum terhadap Pelaksanaan Program <i>Smart Village</i>	29
B. Teori Good Government	30
1. Pengertian Good Government.....	30

2.	Prinsip-Prinsip <i>Good Government</i>	31
3.	<i>Good Government</i> dalam Pelayanan Publik	33
4.	Relevansi <i>Good Government</i> terhadap Program <i>Smart Village</i>	34
C.	Tinjauan Hukum Tata Negara terhadap Kebijakan Digitalisasi Desa	35
1.	Teori Kewenangan (<i>Gezag</i>) sebagai Dasar Tindakan Pemerintah.....	36
2.	Kedudukan Hierarki Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	38
3.	Aktualisasi Prinsip <i>Good Government</i> dalam Tata Kelola Digital	39
D.	Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i> dalam Digitalisasi Pemerintahan Desa...41	
1.	Pengertian <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	41
2.	Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	43
3.	Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i> dalam Administrasi Pemerintahan	45
4.	Relevansi <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i> terhadap Program <i>Smart Village</i>	48
BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PROGRAM SMART VILLAGE DI DESA PLUMPANG		51
A.	Latar Belakang dan Dasar Penerapan Program <i>Smart Village</i> di Desa Plumpang	51
B.	Pelaksanaan Program <i>Smart Village</i> di Desa Plumpang.....	55
1.	Bentuk Layanan <i>Smart Village</i>	56
2.	Sistem Digitalisasi Pelayanan Desa	58
3.	Proses Pelayanan kepada Masyarakat.....	62
4.	Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program <i>Smart Village</i>	66
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Plumpang	69
1.	Faktor Pendukung	70
2.	Faktor Penghambat	72
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DI DESA PLUMPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH.....		76
A.	Analisis Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Plumpang	76
1.	<i>Smart Village</i> sebagai Inovasi Pelayanan Publik Desa.....	76
2.	Implementasi <i>Smart Village</i> dalam Perspektif <i>Good Government</i>	79

3. Implementasi <i>Smart Village</i> dalam Perspektif Asas dan Kepastian Hukum.....	83
B. Analisis Implementasi Program <i>Smart Village</i> di Desa Plumpang dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	86
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
Lampiran	99
Biodata Penulis	109



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Menu Layanan Website Desa Plumpang.....	57
Gambar 2. Anjungan Pelayanan Mandiri Desa Plumpang.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal dan Artikel

- Angkasa, Nitaria. "Smart Village Sebagai Bentuk Good Village Governance Menuju Era Desa Digital." *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 01 (4 Februari 2024): 23–29. doi:10.24967/jaeap.v3i01.2779.
- Apid, Muhamad. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memajukan Desa Cerdas (Smart Village) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Desa Margajaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)." PhD Thesis, IAIN Metro, 2024. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10504/>.
- Azizah, Nurul. "Demokratisasi Desa dalam Upaya Pelaksanaan Smart Village Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Herdiana, Dian. "Pengembangan Konsep Smart Village Bagi Desa-Desa di Indonesia (Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages)." *JURNAL IPTEKKOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 21, no. 1 (12 Juli 2019): 1. doi:10.33164/iptekkom.21.1.2019.1-16.
- Premana, Agyztia, Hendri Sucipto, dan Agung Widianoro. "Pengembangan Desa Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Tegalreja)." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi* 1, no. 1 (7 September 2022): 43–54. doi:10.57248/jilpi.v1i1.15.
- Pujiningsih, Sri. "Pembangunan Desa Dalam Konteks Otonomi Desa Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 19, no. 2 (27 November 2019): 131. doi:10.18592/sjhp.v19i2.3121.
- Siregar, Jonase Emmanuele. "Kapabilitas Digital Dalam Upaya Transformasi Menuju Smart Village pada Pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Desa Sepakung." *Journal of Politic and Government Studies*, 2024, 479–95.

- Suhaimi, Ahmad, dan Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/1831>.
- Susilowati, Anindya Puteri Eka, Rini Rachmawati, dan R. Rijanta. "Konsep Desa Pintar Di Indonesia: TIK Sebagai Faktor Penentu." *Heliyon* 11, no. 1 (Januari 2025): e41657. doi:10.1016/j.heliyon.2025.e41657.

Internet dan Web Page

- Kemenag. "Al-Qur'an. QS An-Nisa' [4]: 58." *Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018). <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-95-tahun-2018>.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Database Peraturan JDIH BPK RI. Diakses 14 Juli 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Database Peraturan JDIH BPK RI. Diakses 14 Juli 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

Wawancara

- Bella, Warga Desa Plumpang. Wawancara, 11 Maret 2026.
- Dholip, Kasi Pelayanan Desa Plumpang. Wawancara, 3 Maret 2026.
- Ferdy, Warga Desa Plumpang. Wawancara, 11 Maret 2026.
- Kasnoto, Warga Desa Plumpang. Wawancara, 11 Maret 2026.
- Rizki, Warga Desa Plumpang. Wawancara, 11 Maret 2026.
- Shodiqin, Warga Desa Plumpang. Wawancara, 11 Maret 2026.
- Tumito, Kepala Desa Plumpang. Wawancara, 3 Maret 2026.